

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan merupakan sebuah proses dalam penyusunan berbagai tahapan kegiatan yang melibatkan orang-orang yang berpengaruh dan berkepentingan dengan tujuan kesejahteraan masyarakat suatu daerah. Program pembangunan terhambat dengan adanya sumber daya manusia yang rendah. Pertumbuhan ekonomi di desa didorong oleh pola *top-down* sebagai prasyarat menciptakan kesejahteraan. Pemerintah Indonesia mengatur segala urusan pemerintahan baik dari pemerintah pusat hingga pemerintah desa dengan memberi wewenang yang diakui dan dihormati secara hukum demi kepentingan kesejahteraan masyarakat.

Belajar dari fenomena tersebut maka selanjutnya terjadi perubahan paradigma dalam pembangunan daerah, seiring diterbitkannya UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan UU No 9 tahun 2015. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan otonomi daerah selain berlandaskan pada acuan hukum, juga sebagai implementasi tuntutan globalisasi yang harus diberdayakan dengan cara memberikan daerah kewenangan yang lebih luas, lebih nyata dan bertanggung jawab, terutama dalam mengatur, memanfaatkan dan menggali sumber-sumber potensi yang ada di daerah masing-masing. Pelaksanaan otonomi daerah merupakan titik fokus yang penting dalam rangka memperbaiki kesejahteraan rakyat. Pengembangan suatu daerah dapat

disesuaikan oleh pemerintah daerah dengan potensi dan kekhasan daerah masing-masing.

Hal ini juga didorong oleh kesadaran pemerintah pusat yang menganggap bahwa yang lebih mengerti tentang kondisi wilayah atau daerah adalah pemerintah daerah itu sendiri dan masyarakatnya. Berangkat dari pemikiran itulah maka kemudian pelimpahan kewenangan dari pusat ke daerah diputuskan. Ketika kebijakan otonomi daerah telah digulirkan, pertanyaan yang segera muncul adalah apakah dengan demikian pembangunan akan lebih dekat dengan kebutuhan masyarakat. Apakah dengan demikian masyarakat memiliki akses yang lebih besar untuk bisa ambil bagian dalam proses pemerintahan. Perencanaan merupakan proses awal sebelum langkah-langkah yang bakal mempengaruhi kehidupan masyarakat berjalan. Jika dalam perencanaan telah dengan sengaja mengabaikan partisipasi masyarakat maka dengan sendirinya langkah-langkah yang akan diciptakan bisa mengancam kehidupan masyarakat. Salah satu kata kunci untuk masalah ini adalah perencanaan daerah dan lebih kecil lagi di lingkup desa.

Konsep otonomi desa memberikan kedudukan yang kuat bagi desa dan masyarakatnya untuk melaksanakan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan pada pasal 26 ayat 2 UU No 6 Tahun 2014, kepala desa memiliki wewenang untuk untuk memimpin serta membuat peraturan mengenai pemanfaatan dana desa untuk mengelola aset desa termasuk sumber daya alam dan sumber daya manusia. Kepala desa berhak melakukan peningkatan perekonomian desa serta mengintegrasikannya supaya mencapai perekonomian yang produktif demi kemakmuran masyarakat desa. Pembangunan desa secara partisipatif sangat baik untuk melihat tingkat kemauan masyarakat

desa untuk melakukan perubahan-perubahan untuk kemajuan desa dan kesejahteraan masyarakat desa. Berasal dari ketertarikan pola pembangunan yang digagas pemerintah dengan melihat kenyataan yang ada di lingkungan masyarakat.

Pembangunan desa bertujuan meminimalisir ketimpangan-ketimpangan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pemanfaatan sumber daya lokal secara berkelanjutan. Pembangunan desa memiliki tahapan-tahapan mulai dari tahap perencanaan, penerapan, dan pengawasan. Pembangunan kawasan perdesaan meliputi:

- a) Penggunaan dan pemanfaatan wilayah desa dalam rangka penetapan kawasan pembangunan sesuai dengan tata ruang Kabupaten/Kota.
- b) Pelayanan yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan.
- c) Pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi perdesaan, dan pengembangan teknologi tepat guna.
- d) Pemberdayaan masyarakat desa untuk meningkatkan akses terhadap pelayanan dan kegiatan ekonomi.

Pelibatan pemerintah desa dalam pemanfaatan aset desa dan tata ruang desa merupakan pembangunan kawasan pedesaan oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, maupun pemerintah daerah. Pemerintah desa dan masyarakat desa harus dilibatkan pada pengaturan mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pembangunan kawasan pedesaan. Semua daerah otonom memiliki peran aktif dalam merencanakan dan membangun daerahnya masing-masing. Indonesia yang terbagi dalam 33 Propinsi yang tersebar di seluruh

nusantara memiliki kesempatan luas untuk menciptakan pembangunan yang kompetitif dengan otonomi tersebut. Jawa Timur sebagai salah satu propinsi juga dituntut mampu untuk bersaing secara sehat melalui kebijakan otonomi daerah tersebut. Jawa Timur terbagi atas beberapa Kabupaten dan wilayah kepulauan, salah satunya adalah Pulau Madura. Madura dikenal sebagai pulau yang masyarakatnya memegang erat nilai-nilai religius dan adat-istiadat. Sehingga pembangunan di tingkat desa juga dipengaruhi oleh hal itu sendiri. Sebab tidak jarang dijumpai kenyataan bahwa tokoh masyarakat itu memiliki kekuatan yang besar dalam menentukan arah pembangunan desa dengan melibatkan masyarakat di dalamnya. Menjadi menarik kemudian ketika Undang-Undang Desa mengatur sedemikian detail didalamnya tentang desa dan segala ketentuannya, namun pada kenyataannya masih tidak linier dengan apa yang ada di lapangan apalagi disandingkan dengan masyarakat desa di Madura dalam perencanaan pembangunan desa.

Penelitian ini ingin membahas tentang perencanaan pembangunan desa dan ketertarikan ini dimulai ketika peneliti melihat kenyataan yang terjadi di lapangan dengan melihat pada aturan-aturan yang berlaku dalam Undang-Undang Desa. Berasal dari ketertarikan terhadap pola pembangunan *bottom up* yang digagas pemerintah tersebut dan dengan melihat kenyataan yang ada di masyarakat, peneliti tertarik untuk meneliti hal ini. Penelitian ini mengambil objek desa yang paling dekat dengan universitas besar di Pulau Madura yakni Universitas Trunojoyo Madura. Berdasarkan hasil observasi ada fenomena di sebuah desa yang letaknya 10 km dari Universitas Trunojoyo Madura yang memiliki sumber daya alam berupa lahan atau tegalan yang hampir 90% tidak dikelola sehingga lahan tersebut menjadi lahan tidur. Desa ini bernama Desa

Parseh, Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan, tepat ini dipilih sebab desa ini memiliki lahan yang sangat luas nomor 2 setelah Desa Jaddih, akan tetapi lahan tersebut tidak dikelola karena minimnya SDM masyarakat khususnya para petani.

Tabel 1.1. Jumlah Penduduk dan Tanah Tegal di Kecamatan Socah

No.	Desa/Kelurahan	Penduduk	Tanah Tegal (Ha)
1.	Junganyar	3 424	12,00
2.	Socah	6 377	35,00
3.	Buluh	4 669	249,00
4.	Jaddih	12 224	581,01
5.	Sanggra Agung	6 380	236,76
6.	Parseh	8 551	285,88
7.	Bilaporah	6 505	260,71
8.	Keleyan	6 377	205,71
9.	Petaonan	3 798	94,81
10.	Dakiring	2 987	27,63
11.	Pernajuh	1 118	7,33

Sumber: Kecamatan Socah Dalam Angka diolah, 2019

Dari tabel diatas menjelaskan bahwa Desa Jaddih yang memiliki jumlah tegalan yang sangat luas nomor 1 di Kecamatan Socah dan kondisi rilnya, lahan di Desa Jaddih hampir seluruh lahan dimanfaatkan oleh para petani dan kelompok tani yang sangat berperan aktif. Sedangkan di Desa Parseh yang menduduki nomor 2 lahan terluas setelah Desa Jaddih hanya 10 % lahan yang dikelola oleh para petani. Banyaknya lahan yang tidak dimanfaatkan kurang lebih 10 tahun dikarenakan tidak ada masyarakat yang mau mengolah lahan tersebut. Desa Parseh memiliki potensi yang sangat besar dari segi kuantittas, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia, akan tetapi sumber daya tersebut belum benar-benar diberdayakan dengan optimal.

Pandangan masyarakat atau petani menganggap bahwa biaya yang dikeluarkan untuk mengolah lahan pertanian lebih besar dibandingkan hasil panen yang kurang maksimal sehingga akan menyebabkan kerugian. Masyarakat Desa Parseh lebih mengutamakan pendapatan sehari-hari dari sumber daya alam batu kapur. Pentingnya peranan sektor pertanian dalam pembangunan ekonomi karena hampir seluruh masyarakat di negara-negara berkembang, masyarakat lebih dominan memanfaatkan sektor pertanian untuk kelangsungan hidupnya. Salah satu cara seorang perencana untuk mengurangi kesenjangan yang terjadi yakni dengan meneliti serta memperhatikan kesejahteraan masyarakat. Sektor pertanian merupakan sektor yang dominan dimanfaatkan oleh masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya dan cara yang dapat ditempuh yakni dengan menambah produksi tanaman pangan lalu meningkatkan harga yang mereka terima atas produksi yang dihasilkan. Berikut ialah tabel bidang dan permasalahan utama Desa Parseh.

Tabel 1.2. Bidang dan Permasalahan Utama

No.	Permasalahan Pemberdayaan Masyarakat	Penyebab
1.	Banyaknya pengangguran	Rendahnya penguasaan keterampilan masyarakat.
2.	Penghasilan petani dan peternak rendah	Rendahnya wawasan dan pengetahuan pertanian dan peternakan terhadap sistem modern, pupuk mahal, irigasi sulit, dan bibit berkualitas rendah.
3.	Kelembagaan kelompok tani yang kurang mandiri	Sistem pertanian masih tradisional

Sumber: Profil Desa Parseh diolah, 2019

Dari tabel diatas menjelaskan bahwa permasalahan di bidang pemberdayaan masyarakat tidak luput dari SDM yang minim sehingga masyarakat tidak dapat mengelola SDA dengan maksimal dan pada akhirnya lahan-lahan dibiarkan begitu saja. Kondisi tanah di Desa Parseh ini sangatlah subur akan tetapi, tidak dimanfaatkan karena SDM petani yang minim dan kurangnya pengairan di musim kemarau maka ada harapan dari beliau ingin menghidupkan lahan pertanian yang lama tidak dimanfaatkan serta dapat menambah penghasilan masyarakat. Para petani enggan untuk melakukan cocok tanam karena tanaman yang ditanam hanya itu-itu saja dan kurangnya ilmu pertanian juga membuat para petani meninggalkan sektor pertanian. Tersedianya sumber air akan tetapi biaya untuk bor air menjadi penyebab kurangnya infrastruktur pengairan. Hampir seluruh petani memiliki alat pertanian tradisional seperti cangkul, arit, dan lain-lain, akan tetapi tidak semua petani memiliki alat pompa untuk pengairan lahan pertanian. Petani harus membayar sewa pompa air untuk mengairi lahan pertanian jika ingin melakukan cocok tanam seperti jagung, kacang dan lain-lain. Pemerintah desa dan masyarakat memiliki antusias yang sangat tinggi dalam semua program pembangunan desa, karena setiap pelaksanaan program pembangunan desa pemerintah desa dan masyarakat ikut serta mensukseskan program pembangunan desa tersebut.

Berdasarkan temuan fakta di lapangan ternyata kualitas SDM sangat rendah dalam proses pembangunan desa melalui pengembangan ekonomi lokal. Kualitas SDM menjadi penentu serta diiringi oleh faktor kepedulian terhadap daerahnya khususnya desa. Pengembangan ekonomi lokal yang dimaksud ialah suatu kegiatan ekonomi untuk mendorong keberlanjutan kehidupan guna meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Pengembangan ekonomi

petani melalui pemanfaatan lahan tidur merupakan bentuk dari pengembangan ekonomi lokal yang perlu diperhatikan ketika lahan di sebuah desa tidak dimanfaatkan. Pemahaman masyarakat dan pemerintah lokal memiliki peran aktif dalam pengembangan ekonomi lokal. Pengembangan ekonomi pedesaan merupakan awal dari pengembangan ekonomi daerah.

Desa Parseh ini pengembangan ekonomi lokal lebih dominan ke pertambangan yakni batu kapur dengan cara tradisional (membakar menjadi kapur bubuk) yang merupakan pekerjaan turun-temurun nenek moyang dari zaman penjajahan Belanda. Banyak masyarakat Desa Parseh yang bekerja di Pertambangan batu kapur galian C pertambangan batu kapur dengan alasan biaya untuk mengelola batu kapur sangat terjangkau dan permintaan konsumen yang lumayan besar. Pertambangan batu kapur galian C ini memiliki masa dimana persediaan sumber daya alam batu kapur bisa habis dalam kurun waktu kurang lebih 20 tahun lagi. Banyaknya lahan di Desa Parseh yang belum dimanfaatkan menjadi alternatif ketika sumber daya alam batu kapur mulai habis. Masyarakat harus sadar dan mulai dilatih kemampuannya dalam pemanfaatan lahan yang luas dan subur, sehingga ketika sumber daya alam batu kapur sudah habis masyarakat tidak kebingungan untuk menambah pendapatan rumah tangga dari pemanfaatan lahan. Sehingga masih diperlukannya kinerja-kinerja baru dalam pengembangan ekonomi lokal di sektor pertanian melalui pemanfaatan lahan tidur guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Parseh. Pengembangan ekonomi lokal merupakan faktor yang dapat memunculkan kinerja-kinerja baru dalam pengemangan sektor pertanian Desa Parseh. Solusi yang dapat dilakukan untuk mengembangkan ekonomi desa yang baik adalah dengan pemanfaatan

lahan pertanian secara optimal yang dapat menyerap tenaga kerja baru atau transformasi ekonomi.

Melihat penjelasan di atas maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang **“PERENCANAAN PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL MELALUI PEMANFAATAN LAHAN TIDUR (Studi Kasus Desa Parseh, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan)”** dengan melihat potensi dan permasalahan di desa serta antusias masyarakat yang sangat tinggi sebagai unsur yang dominan tahu permasalahan desa serta mempunyai kemauan untuk pembangunan desa melalui pengembangan ekonomi lokal.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana identifikasi kondisi pertanian lahan tidur di Desa Parseh?
2. Bagaimana startegi pengembangan ekonomi lokal melalui pemanfaatan lahan tidur?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengidentifikasi kondisi pertanian lahan tidur di Desa Parseh.
2. Untuk menentukan startegi pengembangan ekonomi lokal melalui pemanfaatan lahan tidur.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat Teoritis:

1. Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan mengenai perencanaan pengembangan ekonomi lokal melalui pemanfaatan lahan tidur.
2. Seluruh rangkaian kegiatan dan penelitian diharapkan dapat lebih memantapkan penguasaan fungsi keilmuan yang dipelajari mengenai perencanaan pembangunan sebagai konsentrasi jurusan yang telah dipilih oleh peneliti.
3. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi dokumen akademik yang berguna untuk dijadikan acuan bagi civitas akademika.
4. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran dalam memperkaya wawasan konsep serta praktek perencanaan pengembangan ekonomi lokal.

Manfaat Praktis:

1. Bagi penulis sendiri sebagai tambahan pengetahuan dan pengalaman di kehidupan nyata di luar kehidupan kampus.
2. Menambah daftar pustaka baru yang dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa.
3. Bagi Universitas Trunojoyo Madura pada umumnya dan Program Studi Ekonomi Pembangunan pada khususnya sebagai sumbangan pengetahuan mengenai perencanaan pengembangan ekonomi lokal yang memanfaatkan lahan tidur.
4. Bagi pemerintah melalui penelitian ini diharapkan agar mendapat perhatian yang lebih dari pembuat kebijakan terhadap masyarakat dalam rangka mengembangkan potensi desa dan pemberdayaan masyarakat untuk memajukan kehidupan masyarakat. Pemberdayaan ini dapat menyadarkan masyarakat akan pentingnya pemanfaatan sumber daya lokal guna meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat desa.